

BAB IV

SIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Karya tulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Kabupaten Wonosobo baik secara parsial maupun simultan pada periode tahun 2010 hingga 2020.

Hasil pengujian regresi model I dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh negatif (-) terhadap ketimpangan, akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Selain PAD, pada dana perimbangan juga didapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan variabel DBH, DAU, dan DAK terhadap ketimpangan. Sedangkan jika diuji secara simultan maupun parsial, tidak terdapat pengaruh antara keempat variabel tersebut dengan ketimpangan di Kabupaten Wonosobo. Belum adanya program kerja Kabupaten Wonosobo yang berfokus atau mempunyai dampak mengurangi angka ketimpangan membuat keempat variabel yang diujikan tidak mempunyai pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat ketimpangan di Kabupaten Wonosobo.

Pada pengujian regresi model II, didapatkan hasil bahwa nilai PAD berpengaruh negatif (-) terhadap tingkat kemiskinan, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, untuk variabel dana perimbangan didapatkan hasil bahwa DBH berpengaruh positif (+), DAU berpengaruh positif (+), dan DAK berpengaruh signifikan negatif (-) terhadap tingkat kemiskinan. Dari keempat variabel tersebut

hanya DAK yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Peningkatan DAK yang diterima Kabupaten Wonosobo cenderung digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat seperti pembangunan sekolah dasar, rehabilitasi puskesmas, dan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Pemanfaatan DAK tersebut dapat membuat angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo menurun. Sedangkan ketiga variabel lain yaitu PAD, DBH, dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian model I dan model II, keempat variabel yang diujikan belum bisa memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. Hanya DAK yang sudah diatur peruntukannya mempunyai pengaruh signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan pemerintah daerah dapat mendorong sumber pendapatan daerahnya untuk dialokasikan dalam belanja daerah yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Mengalokasikan PAD, DBH, dan DAU pada bidang-bidang yang bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan dasar seperti halnya DAK, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, adanya pengaruh negatif PAD terhadap ketimpangan dan kemiskinan diharapkan pemerintah daerah dapat menggali lagi potensi sumber-sumber PAD dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.